

Giliran Yahya Muhaimin

Ariel Heryanto

HINGGA saat tulisan ini tersusun, atau setelah berusia seminggu, kasus protes Probosutedjo terhadap Yahya Muhaimin dan LP3ES tampaknya memberikan lebih banyak hikmah ketimbang bencana. Kita layak berterima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat, termasuk para "penggembira" di media massa. Jika kasusnya tidak memburuk, tak ada jeleknya kasus itu terjadi lebih banyak.

Hikmah

Hikmah pertama, kasus ini menunjukkan ternyata ilmuwan kita, bahkan pegawai negeri, masih perduji pada realitas sosial-ekonomi masyarakatnya sendiri. Lebih menggembirakan, ternyata karya seperti itu diminati dan dibaca pembaca umum terpelajar.

Karya ilmiah para akademikus kita tidak difosilkan di gedung perpustakaan sebagai barang istimewa yang hanya boleh disentuh debu, laba-laba dan segelintir elit penuguasa dunia akademik. Ternyata ilmuwan dan penerbit karya ilmiah bersikap terbuka kepada publik, termasuk membuka diri pada protes dan kritik dari publik yang membaca karya itu.

Kedua, publik kita tidak sebodoh dan sedingin yang dituduh banyak pihak. Mereka membaca karya ilmiah, dari seorang doktor sekali pun, dengan sikap kritis (yang dibanggakan dan dikampanyekan ilmuwan). Tidak semua pengusaha bersikap

daban manusia.

Ditilik dari sini, ada baiknya kasus itu tidak terhenti menjadi uap. Kita berharap akan ada pergulatan kebenaran secara jujur, dewasa, kritis dan terbuka. Pergulatan ini tidak harus dilaksanakan di sidang pengadilan. Kalau pun akan disidangkan, juga tak ada jeleknya asalkan lembaga peradilan yang handal secara legal, etis, mau pun ilmiah!

Pribadi, profesi, prinsip

Hikmah keempat, perhatian dan simpati kepada Yahya Muhaimin, khususnya dari rekan seprofesi, menunjukkan solidaritas yang menggembirakan. Walau mengaku siap mempertanggung-jawabkan bukunya "secara ilmiah," Yahya kelihatannya "terpukul" oleh kasus ini dari segi-segi yang non-ilmiah. Solidaritas rekan-rekannya merupakan dukungan non-ilmiah yang dibutuhkannya.

Mengapa bisa ada kesenjangan antara kesiapan ilmiah dan yang non-ilmiah? Ketegangan antara kutub ilmu dan non-ilmu, khususnya kekuasaan politik, bisa kita pahami walau tidak kita nyatakan. Lebih tepatnya dikatakan bahwa karena kita memahaminya maka (bukan walau) kita tak menyatakannya. Ketegangan itu menjadi persoalan pokok yang tak terungkap tegas dari kasus ini.

Persoalan pokok itu dapat dirumuskan sebagai berikut: (a) apakah kita sedang membeli kebenaran dan prinsip-prinsip untuk menghormati kebenaran? Ataukah (b) kita sedang membeli kekuasaan sosial dengan segala priviliee dan dijadikan senjata propa-

yang disebut "kebebasan mimbar akademik?" Ataukah (c) semua ini hanya persoalan solidaritas bersifat pribadi, usaha membantu seorang kenalan bernama Yahya Muhaimin yang diganggu kesulitan?

Setiap pilihan akan merumuskan titik persoalan secara berbeda-beda. Selain pahala yang ingin dicapai lain, ongkos harus dibayar juga berbeda-beda.

Jika pilihan jatuh pada (c), maka persoalan pokoknya ialah bagaimana menggugarkan kasus ini. Dibuang ke mana? Sebut saja "budaya" masyarakat Indonesia masih belum siap dengan soal-soal orang penting seperti ini. Budaya masyarakat inilah yang kita salahkan. Kalau bisa kasus itu dikubur hidup-hidup. Anggap saja tak pernah ada. Caranya? Diusahakan "secara kekeluargaan". Dicari unsur-unsur primordialisme dan klientisme untuk melancarkannya.

Pilihan (b) tampaknya paling dominan dalam berbagai komentar di media massa, yang dibela bukan sekedar seorang pribadi tapi komunitas akademik. Pilihan (b) bukan solidaritas yang bebas pamrih. Pilihan ini bertolak dari kepentingan kelompok profesi. "Jika hari karya ilmiah Yahya bisa diobrak-abrik, barangkali besok giliran kita yang lain". Musuh untuk pilihan (b) dirumuskan tegas: setiap kekuatan elite yang mengancam privilee kaum akademik profesional, termasuk birokrat yang non-ilmiah.

Apakah yang dinamakan "mimbar akademik" dikeramatkan dan dijadikan senjata propa-

ganda. Persis seperti apa yang dikerjakan banyak pejabat pemerintahan dengan slogan "Pembangunan" dan "Pancasila". Jalan ideologi para pemuka dan penguasa "mimbar bebas" itu begini: (i) kebenaran tingkat tertinggi berada di atas mimbar akademik; (ii) tak semua orang mampu naik ke atas mimbar akademik, dan karena itu (iii) tak semua orang berhak berbicara tentang kebenaran.

Dengan demikian kebenaran akademik merupakan kekuasaan sosial dan modal dalam kapitalisme informatif. Kebenaran, seperti aset ekonomi, dapat dimiliki secara monopoli atau oligopoli. Lewat kompetisi bebas atau sistem patron-klien.

Lebih jauh lagi kaum akademikus ini menuntut kebebasan akademik mereka bersifat "bebas hukum." Mirip seniman yang menuntut "kebebasan kreatif" (poetika lisensi). Atau para raja dan rejim modern di negeri-negeri sosialis atau kapitalis otoriter dan ternyata bisa "bebas hukum."

Pilihan (a) merupakan maklumat perang total pada setiap bentuk pemalsuan, penyangkalan, penyembunyian dan penindasan kebenaran atau upaya memahami kebenaran.

Pilihan (a) menghargai kebenaran tanpa mempedulikan apakah kebenaran itu diucapkan atau dibantah oleh seorang doktor, profesor atau pelacur, raja atau hamba, seorang ekstrem kiri atau kanan. Dalam bahasa slogan Pancasila dan UUD '45, juga bahasa banyak agama, setiap orang diperlukan sama dan sederajat. Pilihan (b) tak mu-

dah dicapai dan ongkosnya bisa besar. Pilihan (a) lebih sulit dan resiko jauh lebih besar lagi.

Tak ada rumusan ilmiah untuk menentukan mana dari ketiga pilihan itu yang sebaiknya kita ambil. Pada setiap pilihan hanya ada nilai-nilai: etis campur ilmiah campur estetis campur ekonomis campur politikus campur teknis-praktis campur religius campur filosofis campur edukatif dan seterusnya. Tidak dapat dikatakan salah satu pilihan lebih "benar" secara "objektif" daripada yang lain.

Tak ada keharusan logis bagi ketiga pilihan itu untuk saling bertabrakan. Ideal bila ketiganya dapat dipertemukan. Tapi bila ternyata ketiganya bertabrakan, setiap pilih-an meminta korban.

Perbandingan

Orang Jawa yang sangat canggih dalam filsafat relativisme biasa mengatakan "untung pada saat ada bencana. Ketika ada orang patah tulang kaki karena kecelakaan lalu lintas, dibilangnya "untung tidak mati". Jika dicari-cari "untung Jawa"-nya maka kita akan temui cukup banyak untung dari kasus buku Yahya itu.

Untung pertama, Yahya tidak (moga-moga tidak akan) digugat pemerintah RI. Penggugatnya "hanya" seorang warganegara RI terlepas dari segala keunggulan atau kelebihan pribadinya. Untung Yahya tidak didakwa subversif atau menghina pemerintah atau mengganggu stabilitas nasional dan Pembangunan.

Untung yang kedua, sebagai konsekuensi dari yang

pertama, Yahya hanya digugat menyangkut kebenaran isi tulisan ilmiahnya. Dia ditangkap berdebat tentang kebenaran faktual. Dia siap untuk itu. Dia tidak digugat karena berpendapat tertentu. Bandingkan ini dengan nasib seorang mahasiswa yang berkuliah di fakultas Yahya. Tahun lalu mahasiswa ini dihukum 8 setengah tahun, antara lain karena dianggap terbukti mengucapkan dan menulis sejumlah kalimat untuk skripsinya. Pengadilan tidak mempersoalkan benar atau tidaknya isi pernyataan itu. Si mahasiswa tak mendapatkan solidaritas seperti yang diterima Yahya dari para pembela mimbar akademiknya.

Pengadilan atas mahasiswa itu tak dapat disalahkan, minimal dari segi formal-legal positif. Maklum, di negeri ini memang ada hukum yang mengatur larangan sejumlah ucapan atau pendapat. Terlepas dari cocok atau tidaknya isi ucapan itu dengan kenyataan. Mungkin karena adanya hukum seperti itu ilmuwan merasa gentar menghadapi hukum dan peradilan tak perduji betapa pun merasa benar secara "ilmiah". Stabilitas dan keamanan negeri ini tidak di bawah komando ilmuwan dan tidak disusuri secara "ilmiah."

Mengingat keadaan hukum itu, untung lain dari kasus ini ialah yang digugat bukan seorang anak muda atau mahasiswa yang untuk pertama kali dalam hidupnya mencari kebenaran akademik. menulis makalah atau skripsi. Jika bukan orang setangguh Yahya yang menghadapi cobaan ini, siapa lagi yang dapat kita harapkan? ***

*) Penulis adalah dosen Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.